

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia ada tiga pelaku ekonomi yang memiliki peranan dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Tiga pelaku ekonomi tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan koperasi (Sitio,2001:129). Menurut Sitio (2001) dalam pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa seluruh pelaku ekonomi harus berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan. Berdasarkan filosofi dan prinsip-prinsip koperasi dapat dilihat bahwa kedua asas tersebut telah melekat pada organisasi koperasi sejak koperasi didirikan oleh anggota (Sitio,2001:129). Sukidjo (2008) menambahkan bahwa dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah sektor negara dan koperasi, sedangkan sektor swasta hanya disebut secara implisit.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menempatkan kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Menurut Kamus Umum Lengkap karangan Wojowasito (1982) sokoguruperekonomian dapat diartikan koperasi sebagai “penyangga utama” atau “tulung punggung” perekonomian, sehingga koperasi memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian nasional (Sitio,2001:128).

Menurut Hatta dalam Sitio (2001:131) koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional karena beberapa alasan, yakni koperasi mendidik sikap *self helping* , koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu, koperasi digali

dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia dan koperasi menentang segala paham yang berbau individualism dan kapitalisme.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, definisi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan definisi koperasi tersebut dapat diketahui bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama sehingga keberadaan koperasi dapat membantu kehidupan masyarakat banyak. Sehingga pendirian koperasi disesuaikan dengan kebutuhan masing masing anggotanya, dan fleksibilitas usaha koperasi tercermin dari jenis koperasi yang dipilih oleh anggota.

Sebagai pemilik, anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah (*owner*) dan sebagai pemakai (*user*). Kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanamkan modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Ditinjau dari sudut status, maka keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. (Sitio dan Tamba, 2001)

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992, Pasal 2, menetapkan asas koperasi adalah kekeluargaan dan sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam

tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah koperasi terbesar di pulau jawa pada tahun 2012. Seperti dibuktikan pada tabel 1.1. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki jumlah koperasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah koperasi menunjukkan bahwa di Jawa Timur keberadaan koperasi diperlukan oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan menjamurnya jumlah maupun kualitas koperasi. Koperasi sangat melekat pada masyarakat karena memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Koperasi di Enam Provinsi Pulau Jawa Tahun 2010-2012**

Provinsi	2010	2011	2012
DKI Jakarta	4.790	5.021	5.177
Jawa Barat	14.771	14.856	15.051
Jawa Tengah	19.617	19.679	21.146
DI Yogyakarta	1.926	1.926	2.061
Jawa Timur	19.437	25.052	25.154
Banten	4.083	4.298	4.298

*Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2013*

Perkembangan koperasi selanjutnya ada kecenderungan menuju pada bentuk koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha. Keragaman jenis koperasi ini dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing masing koperasi. Selain itu terbentuknya jenis koperasi juga

dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian anggota, misalnya KPRI, Kopwan, koperasi karyawan, koperasi nelayan.

Perkembangan koperasi selanjutnya ada kecenderungan menuju pada bentuk koperasi yang memiliki berbagai jenis kegiatan usaha. Keragaman jenis koperasi ini dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan awal koperasi tersebut berdiri. Karena koperasi didirikan untuk menciptakan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pada keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola oleh wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun Pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha. Koperasi Wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai Koperasi.

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1992 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian diikuti Peraturan Gubernur Nomor : 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur memiliki empat prioritas utama RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yaitu kesejahteraan rakyat, perluasan lapangan kerja, penguatan ekonomi perempuan dan peningkatan daya saing. (*Diskopumkm,jatimprov.go.id*)

Sasaran Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur 2014-2019 adalah meningkatkan volume usaha UMKM, dan kualitas

kelembagaan koperasi, meningkatkan jumlah wirausaha baru (WUB), meningkatkan volume usaha ekonomi kaum perempuan dalam Renstra tersebut disebutkan dengan jelas bahwa salah satu sasaran Renstra adalah untuk meningkatkan volume usaha kaum perempuan salah satunya adalah melalui usaha koperasi wanita.

Dalam Renstra tersebut disebutkan arah kebijakan salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk kopwan dan Koppontren, dan peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan ketrampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan. Kedua hal tersebut sangat erat kaitanya dengan alasan pembentukan kopwan yang ada di provinsi Jawa Timur. (*Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur 2014-2019*)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Renstra ,maka pada tahun 2009 dan 2010 Pembentukan Koperasi Wanita di Jawa Timur berjumlah 8.506 yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota seperti pada tabel dibawah ini :

### **Tabel 1.2**

## Laporan Koperasi Wanita di Provinsi Jawa Timur

### Posisi Triwulan II Tahun 2015

NO	Kab/Kota	Penerima Hibah 2009-2010	Penerima Hibah Berkinerja Baik			
			2011-2012	2013	2014	Total Kopwan
1	Surabaya	163	39	42	62	143
2	Sidoarjo	358	83	35	139	257
3	Jombang	306	73	46	165	284
4	Gresik	356	85	22	166	273
5	Mojokerto	304	73	51	109	233
6	Kota Mojokerto	18	4	6	0	10
7	Bojonegoro	430	96	36	56	188
8	Tuban	328	69	17	192	287
9	Lamongan	474	112	45	317	474
10	Pamekasan	189	44	9	94	147
11	Bangkalan	281	66	5	97	168
12	Sampang	186	45	28	5	78
13	Sumenep	332	78	24	94	196
14	Kediri	344	80	65	151	296
15	Kota Kediri	46	11	14	19	44
16	Blitar	248	58	44	51	153
17	Kota Blitar	21	5	6	9	21
18	Tulungagung	271	64	54	90	208
19	Nganjuk	284	66	42	30	138
20	Trenggalek	157	36	32	59	127
21	Malang	390	93	21	193	307
22	Kota Malang	57	13	14	31	58
23	Pasuruan	365	87	14	40	141
24	Kota Pasuruan	34	8	2	22	32
25	Probolinggo	330	78	20	61	159
26	Kota Probolinggo	29	7	9	12	28
27	Lumajang	205	48	51	93	192
28	Madiun	206	49	33	97	179
29	Kota Madiun	27	7	8	10	25
30	Ponorogo	305	72	28	180	280
31	Pacitan	171	40	25	83	148
32	Ngawi	217	55	37	101	193
33	Magetan	235	56	37	120	213
34	Jember	248	58	18	113	189
35	Bondowoso	219	53	9	82	144
36	Banyuwangi	217	51	16	36	103
37	Situbondo	136	32	32	54	118
38	Kota Batu	24	6	3	5	14
TOTAL		8.506	2.000	1.000	3.238	6.238

*Sumber Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, 2015*

Dari data tabel 1.2 diatas diketahui bahwa sebagian besar daerah yang mengalami peningkatan jumlah kopwan yang berkinerja baik adalah di wilayah Gerbang Kertasusila. Wilayah Gerbang Kertasusila merupakan wilayah pembangunan (SWP). Penetapan kawasan kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Salah satu wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur adalah SWP I Gerbang kertasusila yang didalamnya terdiri dari 7 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. Wilayah Gerbang Kertasusila merupakan wilayah yang strategis untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti usaha kecil menengah atau perdagangan melihat daerah Gerbang Kertasusila berada di wilayah dekat dengan pusat industri di Provinsi Jawa timur.

Jumlah industri yang ada di Jawa Timur sebesar 54,34 persen berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan mampu menampung 98 persen tenaga kerja. Dari total PDRB Jawa Timur tahun 2013 sebesar 884 triliun, kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB sebesar 57 persen (*Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur 2014*)

Berdasarkan informasi mengenai PDRB Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa pentingnya keberadaan peran koperasi dan UMKM khususnya Kopwan di tengah kehidupan masyarakat. Kopwan memiliki fungsi yang hampir sama dengan perbankan, yaitu menghimpun dana dari anggota/masyarakat dan menyalurkannya kepada anggota/masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar antara koperasi simpan pinjam dan perbankan terletak pada tujuan dari kegiatan

operasionalnya. Kopwan memberi pinjaman dengan tujuan kesejahteraan anggotanya sebagai peminjam atau bisa disebut dengan *service oriented* , sementara perbankan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya atau dikenal dengan *profit oriented*.

Dengan demikian Kopwan harus dapat melayani permintaan simpanan dan pinjaman yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah sehingga kopwan harus meningkatkan kinerjanya agar mampu bertahan hidup dan bersaing dengan lembaga keuangan lain. Efisiensi merupakan rasio antara *input* dan *output*. Kemampuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan (Maflachantun,2010). Pengukuran kinerja lembaga koperasi wanita yang umumnya adalah simpan pinjam digunakan untuk menjaga eksistensi Kopwan untuk melayani anggotanya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Pengukuran kinerja koperasi wanita seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI 14/Per/M.UKM.XII.2009 dapat dilihat dari : Pemodalannya,Kualitas Aktiva Produktif,Penilaian Manajemen,Penilaian Efisiensi,Likuiditas,Kemandiriandan Pertumbuhan, dan Jati Diri Koperasi.

Koperasi wanita yang ada di Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) sebagian besar memiliki bidang usaha simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya,untuk kemudian dipinjamkan kembali pada

anggota-anggotanya yang memerlukan bantuan modal. Disamping bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, koperasi simpan pinjam biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan para rentenir. Dengan menabung serta memperoleh modal dari perusahaan yang mereka miliki sendiri, maka para anggota koperasi kredit tidak hanya akan menikmati hasil simpanan serta hasil usaha perusahaannya, tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang murah..

Sebagian usaha Kopwan adalah simpan pinjam. Usaha simpan pinjam merupakan bentuk usaha yang fleksibel karena sebagai pelaksanaan Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam peraturan Pemerintah.

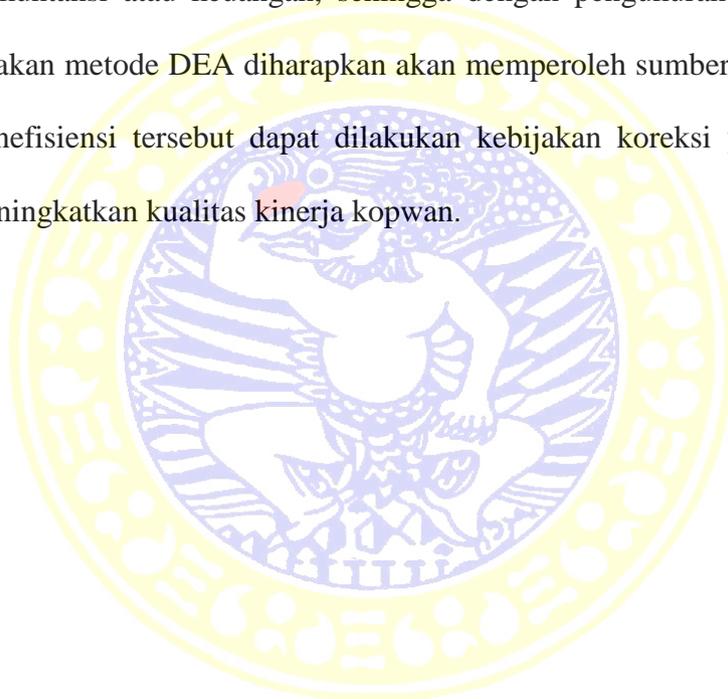
Menurut Sitio dan Tamba (2001:79), Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota. Partisipasi anggota adalah partisipasi modal berupa modal sendiri dan transaksi yang dilakukan anggota. Apabila semakin besar modal berupa modal sendiri yang di setor, maka akan semakin besar pada keleluasaan para anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh oleh pihak koperasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Modal sendiri berpengaruh terhadap perolehan SHU, Semakin besar modal sendiri yang disetor diharapkan koperasi dapat memperoleh SHU yang besar pula.

Penelitian mengenai efisiensi dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) telah dilakukan oleh Akbar (2010). Penelitian tersebut menggunakan objek seluruh cabang lembaga keuangan Baitul Mal Tanwil Bina Ummat Sejahtera. Menurut Akbar, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang tetap bertahan ketika terjadi krisis. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa terdapat lima cabang BMT yang efisien secara relatif terhadap seluruh kantor cabang yang lain. Dan kantor cabang yang memiliki efisiensi relatif dijadikan acuan bagi kantor cabang yang tidak efisien.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali, (2009). Jika Akbar (2010) hanya menggunakan DEA onestage, maka dalam penelitian Ali membahas studi efisiensi BMT MMU dan BMT UGT sidogiri dengan menggunakan two stage data envelopment analysis (DEA). Pertama menggunakan pendekatan DEA untuk mengukur efisiensi BMT dalam sampel penelitian. Langkah kedua menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan efisiensi dengan menggunakan regresi Tobit. Hasil dari studi tersebut menyatakan bahwa BMT MMU dan UGT relative masih belum efisien. Dan sumber utama inefisiensi BMT MMU adalah jumlah pembiayaan yang masih kurang optimal. Sementara sumber utama inefisiensi pada BMT UGT terletak pada penghimpunan dana pihak ketiga yang kurang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Ali menggunakan objek penelitian koperasi berbasis syariah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berbasis konvensional.

Penelitian ini menganalisis kinerja Kopwan dari sisi efisiensi teknis dan mengupas penyebab sumber inefisien yang dapat menurunkan kinerja internal

kopwan. Pengukuran efisiensi teknis dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis Data Envelopment Analysis (DEA) karena selama ini pengukuran kinerja kopwan dengan menggunakan instrument penilaian kopwan berkinerja baik dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian yang sesuai dengan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor : 14/Per/M.KUKM.XII/2009. Instrumen tersebut hanya melihat kopwan pada kondisi akuntansi atau keuangan, sehingga dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode DEA diharapkan akan memperoleh sumber inefisiensi, dari sumber inefisiensi tersebut dapat dilakukan kebijakan koreksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja kopwan.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi teknis setiap koperasi wanita di Gerbang Kertasusila yang memiliki kinerja baik pada tahun 2011?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis tingkat efisiensi teknis :

1. Setiap Koperasi wanita di Gerbang Kertasusila yang memiliki kinerja baik pada tahun 2011

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak koperasi Wanita di Gerbang Kertasusila untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran dan masukan dalam mengembangkan usaha koperasi dimasa yang akan datang.
2. Bagi rekan rekan sesama peneliti sebagai masukan dalam melakukan penelitian , apabila melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
3. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebagai pengetahuan koperasi wanita mana yang telah efisien dan belum efisien.
4. Bagi pemerintah menjadi tolak ukur koperasi wanita mana saja yang efisien dan tidak efisien.

## **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bagian yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini juga akan membahas tentang pengkajian hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta berisi tentang hipotesis dan kerangka konseptual.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum, deskripsi penelitian, analisis data, pembuktian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil analisis. Uraian objek penelitian analisis penelitian didasarkan pada data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data yang telah diolah oleh penulis.

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dari simpulan tersebut juga disertakan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.

